

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suparji, 2019, Menimbang Putusan Judex Jurix Terhadap Upaya PK, Sindonews.Com, Diunduh dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1424985/18/menimbang-putusan-judex-juris-terhadap-upaya-pk>, 15 Juli 2021
- Badan Litbang Diklat Hukum Mahkamah Agung, 2019, *Mahkamah Agung sebagai judex juris ataukah judex factie kajian terhadap asas teori dan praktek*, Mahkamah Agung, Diunduh dari, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/759-mahkamah-agung-sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti-kajian-terhadap-asas-teori-dan-praktek.html>, 10 September 2019, Pk 12.30
- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Daslani, Pitan, (ed.) 2019, *Menyibak Kebenaran Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman Jilid 2*, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Daslani, Pitan, (ed.) 2019, "Jangan Menggurui Mahkamah Agung" dalam *Menyibak Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman Jilid 2, Cetakan ke 2*, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Daslani, Pitan, (ed.) 2019, "Memahami Delik Dagang Pengaruh dalam Rumusan UNCAC", dalam *Menyibak Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman Jilid 2, Cetakan ke 2* Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Daslani, Pitan, (ed.) 2019, "Gratifikasi Seperti Apa yang bisa dipidana?" dalam *Menyibak Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman Jilid 2, Cetakan ke 2* Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Daslani, Pitan, (ed.) 2019, "Kesalahan Putusan hakim dalam perkara Irman Gusman" dalam *Menyibak Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman Jilid 2, Cetakan ke 2* Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Daslani, Pitan, (ed.) 2019, "Yang Mulia yang Mulia Akhlak dan Perilakunya" dalam *Menyibak Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman Jilid 2, Cetakan ke 2* Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Daslani, Pitan (ed.), 2021, *Menyibak Kebenaran: Drama Hukum Jejak langkah & Gagasan Irman Gusman*, Buku ke-3 dari Serial Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.

- Djamali, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press.
- DPD RI, 2018, *Tugas Dan Wewenang DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, dari <https://dpd.go.id/> pada 5 Oktober 2018, Pk 17.20
- Firmansyah, Teguh, 2016, *Perjalanan Karir Politik Irman Gusman, Dari Aktivist Hingga Menjadi Dewan*, Republika.com, Diunduh dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/17/odn7ix377-perjalanan-karir-politik-irman-gusman-dari-aktivis-hingga-jadi-dewan>, 16 September 2019, Pk. 14.15.
- Gusman, Irman, 2014, *Daerah Maju Indonesia Satu*, Jakarta: Anugrah Tri Lestari.
- Hafrida, 2013, Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dapat diakses Melalui: <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2178>
- Hukum Online, 2017, *Irman Gusman divonis 4,5 tahun dan pencabutan hak politik*, Hukum Online.com, Diunduh dari, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58aa897788bc0/irman-gusman-divonis-4-5-tahun-dan-pencabutan-hak-politik/>, 20 Februari 2017, Pk 09.30
- Journal UAJY, 2020, *Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Diunduh dari <http://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf>, 8 Juni 2020, Pk 19.00
- KPK, Tanpa Tahun, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: ACLC-KPK.
- KPK, 2016, *Dasar Hukum tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan.
- Kumendong Wempie JH, 2016, Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 KUHPidana, Dapat Diakses Melalui: http://repo.unsrat.ac.id/1429/1/CAKUPAN_TERHADAP_KEMAMPUAN_BERTANGGUNG_JAWAB_BERDASARKAN_PASAL_44_KUHPIDANA.pdf.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo, 2011, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Litigasi, 2018, *Kekeliruan dan kekhilafan hakim menjadi alasan peninjauan kembali*, Litigasi.co.id, Diunduh dari <https://www.litigasi.co.id/hukum-acara/60/kekeliruan-dan-kekhilafan-hakim-menjadi-alasan-peninjauan-kembali#:~:text=Bahwa%20>

kekhilafan%20hakim%20adalah%20kekhilafan,dalam%20tingkat%20kasasi%20 sudah%20meninggal, 22 Mei 2018, Pk 15.00

Mandiri Kiprah B Side, 2014, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, Dapat diakses melalui: <https://core.ac.uk/download/pdf/77621752.pdf>

Meilano Wahyu, 2019, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Nomor: 238/PID.SUS/2018 PN.LHT), Dapat diakses melalui: <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4484/2/BAB%20II%20-%20Lampiran-dikonversi.pdf>,

Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.

PN Karanganyar, 2018, *Upaya Hukum Pidana*, Pengadilan Negeri Karanganyar, Diunduh dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/715-upaya-hukum-pidana>, 24 Oktober 2018, Pk 23.00

Prabowo, Eddie, Kuswiratno Bonafisius Aji dan Barito Julius Caesar, 2007, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Cara untuk Memperkuat Peranan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia, *Jurnal Hukum Pembangunan: Vol. 4*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Pramesti, Tri Jaya Ayu, 2013, Apakah Putusan Hakim Harus Diumumkan?, HukumOnline.com, Diunduh dari [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5278b3136b695/apakah-putusan-hakim-harus-diumumkan/#:~:text=Putusan%20pengadilan%20adalah%20pernyataan%20hakim,Pidana%20\(%E2%80%9CKUHAP%E2%80%9D\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5278b3136b695/apakah-putusan-hakim-harus-diumumkan/#:~:text=Putusan%20pengadilan%20adalah%20pernyataan%20hakim,Pidana%20(%E2%80%9CKUHAP%E2%80%9D),), 6 November 2020, Pk 17.00

Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press.

Pusat Edukasi Antikorupsi, 2021, KPK Diunduh dari <https://aclc.kpk.go.id>

Putri Arum Sutrisni, 2019, *UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, Kompas.com Diunduh dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi?page=all>, 12 Desember 2019, Pk 19.00

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.26/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2016/PN. Jkt. Pst
- Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST
- Putusan Mahkamah Agung RI No.97 PK/Pid.Sus/2019 tentang Peninjauan Kembali
- Retaduari, Elza Astari, 2016, *Jadi Tersangka, Ini Profil Irman Gusman yang ditangkap KPK terkait suap*, detik.com, diunduh dari, <https://news.detik.com/berita/d-3300350/jadi-tersangka-ini-profil-irman-gusman-yang-ditangkap-kpk-terkait-suap>, 17 September 2019, Pk 14.21
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Simandjuntak, Marcella Elwina, 2011, *Upaya Pemberantasan Korupsi*, dalam Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, Indah Sri Utari, dan Yusuf Kurniadi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kemdikbud.
- Situngkir, Daniel Aditia, 2018, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, *Soematra Law Review*, Volume 1 No.1
- Soerjowinoto Petrus, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Diunduh dari <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Diunduh dari <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf>